

“Anda adalah PELITA!”

Jayapura, 4 September 2004. Sebagai tanggapan terhadap pelantikan anggota DPRD di seluruh Papua, para pemimpin agama mengeluarkan pernyataan kepada anggota dewan yang baru dilantik untuk masa jabatan 2004-2009. Dalam pernyataannya para pemimpin agama mengungkapkan secara tegas harapan masyarakat Papua akan, “Suatu perubahan yang lebih baik; ada pembaharuan sistem yang menjanjikan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warga masyarakat. Maka, dimata masyarakat Papua saat ini, kalian adalah **PEmimpin Lima TAHun** alias **PELITA** untuk negeri ini”. Demikian arti PELITA yang menjadi inti pernyataan yang ditandatangani oleh **Mgr. Leo Laba Ladjar OFM** (Uskup Jayapura), **Pdt. Herman Saud** (Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Papua), **H. Zubeir D. Hussein** (Ketua the MUI Wilayah Papua), **I. Nyoman Suda** (Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Papua), **Pandita Arya Bodhi** (Sekretaris Majelis Buddhayana Indonesia Provinsi Papua).

Para Pemimpin Agama ini mengeluarkan pernyataan ini berdasarkan atas pengamatan mereka terhadap realitas sosial yang berkembang di Papua ini. “Situasi Papua yang penuh gejolak menjadikan masyarakat terus-menerus hidup dalam kegelisahan dan tiadanya kepastian akan masa depan yang penuh damai sejahtera, sepantasnya mengusik nurani kita semua agar secara bersama-sama memperjuangkan terciptanya perubahan yang mewujudkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan”. Karena itu mereka menegaskan tanggung jawab moral yang ada di pundak anggota DPRD yang baru dilantik ini karena hingga kini masyarakat Papua masih merindukan agar anaknya menjadi wakil rakyat yang jujur, tekun, dan takut akan Tuhan serta rela berkorban demi kepentingan masyarakat banyak.

Pernyataan ini telah disebarluaskan ke kalangan anggota DPRD di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi dan bahkan di beberapa tempat, pernyataan ini dibacakan pada acara pelantikan anggota dewan. Seperti terjadi di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia, pelantikan anggota dewan di Papua tak lepas dari unjuk rasa mahasiswa. Misalnya, di kota Jayapura Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi demo saat DPRD Kota Jayapura dilantik di kantor DPRD di Kotaraja, 2 September 2004.